

# LAPORAN PENELITIAN



## DEMOKRATISASI DAN GLOBALISASI POLITIK DI ASIA TENGGARA (Media Sosial dan Pemilu Malaysia 2018)

Pengusul

**Arizka Warganegara, Ph.D** (NIDN 0020068103/ SINTA ID 6043929)  
**Dr. Syarief Makhya** (NIDN 002007610/ SINTA ID 6045889)  
**Drs. Denden K Drajat, M.Si** (NIDN 0029076003/ SINTA ID 6042157)

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**Penelitian Dasar Universitas Lampung**

1. Judul Penelitian : DEMOKRATISASI DAN GLOBALISASI  
POLITIK DI ASIA TENGGARA  
(Media Sosial dan Pemilu Malaysia 2018)

Jenis Penelitian : Penelitian Dasar

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Arizka Warganegara, Ph.D.  
b. NIDN : 0020068103/6043929  
c. SINTA ID : 6043929  
d. Jabatan Fungsional : Lektor/III d  
e. Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
f. No. Hp : 081279290888  
g. Alamat E-mail : arizka.warganegara@fisip.unila.ac.id

Anggota Penelitian (1)

a. Nama Lengkap : Dr. Syarief Makhya  
b. NIDN/SINTA ID : 002007610/6045889  
c. Sinta ID : 6045889  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Anggota Penelitian (2)

a. Nama Lengkap : Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.  
b. NIDN/SINTA ID : 0029076003/6042157  
c. Sinta ID : 6042157  
d. Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jumlah Mahasiswa Terlibat : -  
Jumlah Alumni yang terlibat : -  
Jumlah Staf yang terlibat : -  
Lokasi kegiatan : -  
Lama kegiatan : 6 (Enam Bulan)  
Biaya Penelitian : Rp 10.000.000 ,-  
Sumber Dana : DIPA FISIP Unila

Bandar Lampung, 9 September 2019  
Ketua Pelaksana

Kajur Ilmu Pemerintahan FISIP

  
**Drs. Sigit Krisbiantoro, M.IP**  
NIP. 196112181989021001

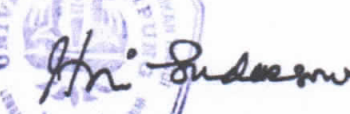
  
**Arizka Warganegara, Ph.D.**  
NIP. 198106202006041003

Mengetahui

Wadek I FISIP Universitas Lampung

Ketua LPPM

  
**Drs. Susetyo, M.Si.**  
NIP. 195810041989021001

  
**Prof. Dr. Hamim Sudarsono, M.Sc.**  
NIP. 196001191984031002

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	3 - 11 - 2022
NO INVEN	200 / UM 26 / 8 / Lppm / 2022
JENIS	Penelitian
PARAF	8

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
BAB II KONSEP DAN PENDEKATAN.....	9
2.1 Konsep Umum Globalisasi .....	9
2.2 Kajian Mengenai Globalisasi dan Demokratisasi .....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
BAB IV DINAMIKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA .....	16
4.1 Pembangunan ala Mahathir.....	16
4.2 Politik Malaysia: Sebuah Diskusi .....	21
BAB V GLOBALISASI, MEDIA DAN PERUBAHAN POLITIK MALAYSIA .....	27
5.1 Globalisasi, Politik dan Media Alternatif: Pengalaman Malaysia.....	27
5.2 Kanal Malaysia Kini, The Malaysian Insider dan Gerakan Pro-Demokrasi.....	30
BAB VI KESIMPULAN.....	38
RINCIAN KEBUTUHAN DANA.....	40
DAFTAR PUSTAKA .....	41
CURICULLUM VITAE PENELITI.....	43

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Runtuhnya Uni Sovyet adalah sebagai contoh implikasi langsung dari perkembangan globalisasi, hal yang sangat nyata dalam kehidupan politik dunia pada era 1990-an. Uni Sovyet adalah sebuah negara yang sangat luas terdiri dari beberapa wilayah serta etnik yang beragam, dengan paham komunisme selama beberapa dekade Uni Sovyet menjadi sebagai sebuah negara yang besar mampu untuk tetap bertahan dari ancaman disintegrasi.

Uni Sovyet adalah negara yang terdiri dari beberapa negara-negara kecil yang kemudian mengadakan sebuah ikatan untuk membentuk negara kesatuan (*Unitary State*) selama kurun waktu kurang lebih 5 dekade Uni Sovyet menjadikan negaranya sebagai penyeimbang dari kekuatan kapitalisme.

Dengan dimulainya era keterbukaan politik yang terbawa oleh “*misi diplomatik ala kapitalisme*” yang bernama *globalisasi* ke seluruh dunia pada awal tahun 1990-an. Tuntutan-tuntutan global itulah yang kemudian membuat Uni Sovyet segera melakukan modernisasi serta reformasi sistem politik dan ekonomi yang dinilai tidak lagi memiliki efisiensi untuk dapat bersaing dengan sistem kapitalisme. Akhirnya untuk merespon perubahan tersebut pada akhir tahun 1980-an Mikail Gorbachev melakukan reformasi terhadap sistem politik dan ekonomi negara tersebut, hal ini diharapkan sebagai sebuah strategi agar tetap dapat

bertahan dalam suasana keterbukaan dan pergaulan dunia yang sangat bercirikan globalisme tersebut (Gorbachev, 1987).

Gorbachev kemudian menjalankan tiga hal penting bagi Uni Sovyet yaitu *Glasnost* (Keterbukaan), *Demokratizia* (Demokratisasi) serta *Perestroika* (Perubahan) (Gorbachev, 1987). implikasi dari ketiga hal tersebut kemudian menjadikan Uni Sovyet lebih terbuka dalam menjalankan pemerintahan serta sistem politik dan ekonomi. Fenomena sosial, ekonomi dan politik ini yang kemudian berakibat sistem komunisme tidak dapat bertahan lama dan akhirnya menyebabkan keruntuhan negara tersebut. Pasca Uni Sovyet bubar, tuntutan global kemudian melanda seluruh negara terutama negara-negara di benua Asia untuk melakukan hal yang sama sebagai konsekuensi mengikuti logika globalisme tersebut.

Terdapat banyak pendapat menyoal globalisasi ataupun demokratisasi, pada satu bagian globalisasi sering diartikan sebagai kelanjutan daripada sistem kapitalisme manakala demokratisasi dalam hal ini "demokrasi liberal" seringkali dianggap sebagai alat yang dipergunakan bagi mengukuhkan perkembangan globalisasi kapitalisme pada negara-negara dunia ketiga ataupun negara-negara pengguna produk daripada kapitalisme.

Indonesia mulai menjalankan sistem politik negaranya dengan konsep otoritarian rejim pada tahun 1945, hal ini diambil oleh para *founding father* karena pada masa tersebut, sebagai sebuah negara yang baru masih dalam proses *trial and error*.

Ketika Indonesia di bawah rejim Soekarno, beberapa bentuk pemerintahan otoriter di jalankan oleh Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpinnya. Kemudian pemerintahan diambil alih oleh Soeharto, rejim ini lebih kepada sebuah rejim militer yang berbentuk otoriter. Pada tahun 1998 reformasi terjadi dalam konteks inilah Indonesia memulai lagi menerapkan demokrasi minimal.

Sementara itu pada tahun 1957 Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Pada waktu tersebut Malaysia telah menjalankan demokrasi minimal, akan tetapi pada tahun 1969 Malaysia beralih kepada format rejim otoriter kemudian pada tahun 1971 Malaysia kembali mulai menerapkan kembali demokrasi minimal.

Hal ini mendapatkan sebuah kecenderungan bahwa demokratisasi yang terjadi dalam konteks negara-negara di kawasan Asia seolah-olah merupakan “*sebuah pemaksaan*” kapitalisme dengan menggunakan globalisasi sebagai alatnya. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh pakar ilmu politik bahwa demokratisasi yang terjadi di benua Asia lebih kepada strategi untuk melahirkan hegemoni kapitalisme di benua tersebut.

Pada bagian lain yang justru menarik untuk diteliti lebih lanjut adalah, krisis ekonomi di Asia Tenggara terjadi medio 1997-1998, pembangunan di beberapa negara Asia Tenggara yang banyak mengandalkan dana-dana asing kemudian berimplikasi pada *dependent development* atau ketergantungan pembangunan. Pembangunan hampir di beberapa negara Asia Tenggara tidak berdasarkan pada *local strategy* namun mengikuti logika lembaga-lembaga peminjam uang.

Kasus yang menarik adalah reformasi politik di Indonesia dan Malaysia terjadi pada tahun yang sama yaitu 1998. Model reformasi politik akibat globalisasi juga sedikit berbeda, jika di Indonesia sampai terjadi penggulingan rezim akan tetapi di Malaysia rezim lama tetap *survive* dan kemampuan rezim lama untuk memperbaiki krisis ekonomi menjadi salah satu hal yang membuat reformasi politik di Malaysia tidak sampai pada tahap pergantian rezim.

Sementara itu di Thailand pada tanggal 19 September 2006 Thaksin dikudeta oleh Tentara yang menganggap bahwa Thaksin sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat dalam Pemilu yang demokratis tidak mampu untuk melakukan sebuah reformasi dalam tatanan ekonomi pasca krisis ekonomi yang melanda Thailand medio 1998.

Dalam konteks kekinian, Pemilu Malaysia 2018 juga memberikan nuansa baru manakala Koalisi Barisan Nasional yang sudah lama berkuasa di Malaysia selama 61 tahun akhirnya tumbang dan dikalahkan oleh Koalisi Pakatan Harapan (Alliance of Hope). Apakah ini juga bagian dari proses demokratisasi melalui gerbang Globalisasi yang melanda dunia terutama setelah peristiwa *Arab Spring*.

Terdapat beberapa faktor yang diduga kuat menjadi alasan kekalahan Koalisi Barisan Nasional, antara lain performa atau kinerja ekonomi yang kurang memuaskan serta skandal dugaan korupsi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Selain itu, penggunaan massif media sosial

sebagai bagian dari implikasi globalisasi juga mempunyai peran yang signifikan dalam memengaruhi Pemilu Malaysia pada pemilu yang lalu, walaupun hal ini sudah dijelaskan oleh menjelang Pemilu Malaysia tahun 2013 (Weiss, 2012).

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ingin mengkaji sejauh mana implikasi globalisasi demokratisasi dan media sosial terhadap perubahan rezim politik di Malaysia hasil Pemilu 2018.

## **1.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimakah implikasi globalisasi terhadap demokratisasi dan perubahan politik di Malaysia hasil Pemilu 2018?
- b. Bagaimana media sosial dan apakah faktor lain yang berkontribusi terhadap kekalahan Koalisi Barisan Nasional pada Pemilu 2018 yang lalu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini ingin meneliti lebih lanjut mengenai implikasi globalisasi terhadap perubahan politik di Malaysia sebagai akibat hasil dari Pemilu 2018
- b. Penelitian ini ingin mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan Koalisi Barisan Nasional mengalami kekalahan dalam Pemilu 2018 yang lalu.



## BAB II KONSEP DAN PENDEKATAN

### 2.1 Konsep Umum Globalisasi

Globalisasi adalah sebuah bahasan yang sangat penting terutama dalam pendekatan-pendekatan politik internasional. Terbukanya sistem politik dunia pada saat ini menuju kecenderungan ke arah yang lebih demokratis adalah salah satu dampak yang ditimbulkan oleh berkembangnya globalisasi, dengan menggunakan perkembangan teknologi *ICT (Information Communiation and Technology)* seperti internet dan *hand phone* globalisasi menjadi semakin berkembang tidak hanya dalam tataran dunia sosial akan tetapi mengarah kepada wacana ekonomi politik serta praktek ekonomi politik di setiap negara. Misalnya apa yang sedang terjadi baik hal yang bersifat positif ataupun negatif dalam konteks politik Indonesia dengan cepat akan mempengaruhi bursa saham di *Kuala Lumpur Stock Exchange (KLSE)* ataupun *Dow Jones* di New York.

Dunia tanpa batas (*Borderless*) menjadi salah satu tema yang penting dalam wacana globalisasi, dalam konteks politik dunia misalnya berkembangnya demokrasi pada negara-negara maju berdampak kepada negara-negara berkembang. Tidak hanya itu globalisasi juga membawa dampak negatif dimana kapitalisme global yang merupakan ideologi besar yang kemudian mengatasnamakan ianya sebagai “*globalisasi*” semakin membuat negara-negara dunia ketiga menjadi sangat bergantung kepada negara-negara besar.

Globalisasi adalah sebuah fenomena yang telah berkembang lama jauh sebelum Kenichi Ohmae ataupun pengasas ideologi ini berteori. Akan tetapi sebagai sebuah fenomena, globalisasi mulai "terkuak" setelah perang dingin berakhir dengan adanya momentum runtuhnya salah satu blok kuat dunia yaitu Uni Sovyet. Globalisasi sebenarnya mempunyai banyak agenda bukan hanya mengekalkan kapitalisme perdagangan akan tetapi lebih dari hal tersebut, globalisasi juga merupakan pendulum bagi perkembangan demokrasi<sup>1</sup> di negara-negara dunia ketiga (dalam hal ini demokrasi liberal).

Menurut Embong (2000) globalisasi dikaitkan dengan konsep pengurangan kedaulatan negara, keterobosan batas wilayah, kecanggihan teknologi, pengecilan dunia dan pengembangan transaksi perdagangan berdasarkan pemikiran perdagangan bebas. Hal lainnya diungkapkan oleh Yoshihara Kunio<sup>2</sup> bahwa globalisasi bukan saja membawa definisi yang bersifat sejagat di kalangan penduduk dunia, tetapi juga mengancam proses pembentukan negara bangsa, oleh karena globalisasi pada dasarnya ingin mewujudkan negara tanpa batas.

## **2.2 Kajian Mengenai Globalisasi dan Demokratisasi**

Studi yang dilakukan oleh Doorenspleet (2000) merujuk pada studi yang dilakukan oleh Huntington mengenai *The Third Wave* mencoba untuk menganalisis fenomena politik tersebut. Dalam studi yang dilakukan Doorenspleet

---

1 Demokrasi sebagai sebuah *term* mempunyai banyak pengertian dan makna, demokrasi yang coba diaplikasikan dalam konteks dunia sekarang yang paling dominan adalah gagasan demokrasi liberal yang tentunya dianjurkan oleh negara-negara kapitalis besar dunia.

2 Hal tersebut diungkapkan oleh Yoshihara Kunio dalam seri kuliahnya *The Pok Rafeah Chair Public Lecture* di IKMAS (Istitute of Malaysian and International Studies) Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 2001.

didapatkan sebuah teori penting bahwa tahap demokratisasi selalu akan diawali oleh tahap demokrasi minimal terlebih dahulu. Setidaknya menurut Doorenspleet (2000) proses demokrasi minimal tersebut mempunyai dua persyaratan:

**Pertama**, adanya sebuah kompetisi hal ini dapat dilihat jika ada sebuah institusi dan beberapa hal yang memungkinkan untuk warga negara membuat alternatif-alternatif pilihan kebijakan yang akan di buat oleh pemerintah. Artinya bahwa pihak pemerintah selalu memperhatikan aspek kritikan warga negara terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kompetisi dalam politik juga dapat dimaknai dengan terpilihnya pemerintah melalui pemilihan umum yang berasaskan pada *competitive popular elections* dimana adanya keterbukaan dalam *executive recruitment*.

**Kedua**, adalah semangat universalisme (*the norm of universality*) artinya semua warga negara tidak memandangkan jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan (*income*), pendidikan dan agama atau kepercayaan. Semua golongan mempunyai hak yang sama dalam pilihan raya dan hak untuk dipilih (*the right to be elected*). Peringkat keterbukaan dalam sebuah sistem politik terbagi dalam empat kategori:

1. Tidak adanya hak pilih populer (Pemilu)
2. Hak Pilih ditiadakan untuk bagian terbesar dari masyarakat (Lebih dari 20 persen)
3. Hak pilih dengan adanya pembatasan (Kurang dari 20 persen)
4. Hak pilih yang menyeluruh dengan pembatasan yang sangat minimal

Dalam studi tersebut jika sebuah negara masuk dalam katagori ketiga dan keempat, negara tersebut telah menjalankan konsep demokrasi yang minimal. Akan tetapi jika sebuah negara masuk dalam kategori pertama atau kedua, maka negara tersebut berada pada kondisi negara yang otoriter.

Pada bagian lain, terdapat tiga arus besar pendapat menyoal globalisasi, masing-masing mempunyai perspektif yang berbeda satu dengan lainnya Embong (2000):

1. *Hyperglobalizer* teori ini dikemukakan oleh Kenichi Ohmae. Aliran ini menjelaskan mengenai akibat kemajuan teknologi telah mempersempit ruang dan waktu. Hal ini akan berdampak kepada logika *borderless* di mana jarak dan sempadan atau batas wilayah menjadi semakin berkurang. Dalam konteks ini Kenichi Ohmae mengatakan bahwa akan terjadi sebuah konsep di mana terwujudnya sebuah kampung global (*Global Village*). Sehingga negara bangsa tidak mempunyai pilihan kecuali untuk melakukan *open market* atau pasar bebas.
2. *Skeptics* teori yang kedua ini di dukung oleh Paul Hirst dan Grahame Thompson, Wallerstein mereka percaya bahwa fenomena global bermula sejak abad ke-17 dengan dimulainya pencarian bahan mentah bagi keperluan produksi bangsa-bangsa barat. Globalisasi dalam aliran ini lebih kepada penghijrahan di antara kawasan.
3. *Transformationalist* dipelopori oleh Andrew Gidden melihat globalisasi adalah sebuah fenomena yang baru, yang berlainan dengan modernisasi atau westernisasi. Globalisasi melalui penggunaan teknologi yang canggih seperti

telekomunikasi telah menukar pemikiran dan budaya manusia. Proses globalisasi bukan saja memberi dampak pada sektor ekonomi bahkan aspek politik dan budaya. Dalam konteks ekonomi, kuasa besar ekonomi seperti Jepang, Eropa Bersatu dan Amerika Serikat akan menentukan keadaan ekonomi dunia. Manakala dampak politik adalah terjadinya sebuah konflik diantara proses globalisasi itu sendiri dengan terbentuknya negara bangsa.

Sebagai sebuah agenda terselubung negara-negara kapitalis terhadap negara-negara berkembang. demokratisasi (demokrasi liberal) politik dunia menunjukkan kurva yang menaik terutama setelah era keterbukaan dimulai dengan runtuhnya Uni Sovyet sebagai momentumnya. Banyak pakar berpendapat bahwa globalisasi dan demokratisasi mempunyai korelasi yang tidak terpisah artinya globalisasi akan mempengaruhi perkembangan demokratisasi dan sebaliknya.

Globalisasi berdampak pada semakin terbukanya sistem pemerintahan sebuah negara dan hal itu yang menyebabkan tumbuhnya kehidupan yang mengakomodasi syarat-syarat demokrasi seperti keterbukaan, masyarakat sipil dan pemilihan umum. Dan dalam konteks inilah sisi positif dari globalisasi adalah menebarkan *virus* bagi mendorong sistem politik yang lebih demokratis.

## BAB III METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan studi deskriptif-kualitatif, sebuah studi yang didasarkan pada metode kajian kepustakaan (*Library Research*). Terdapat 3 (dua) asumsi metodologis dalam studi ini yang menguatkan bahwa perubahan rezim di Malaysia adalah akibat dari globalisasi dan demokratisasi politik yang terjadi di Asia Tenggara medio akhir 1990-an. **Pertama**. Bahwa implikasi globalisasi terhadap demokratisasi politik diasumsikan dimulai sejak tahun 1990 semenjak runtuhnya blok timur yang dimobilisir oleh Uni Sovyet (Huntington, 1993) dan asumsi **Kedua**, terdapat 4 dimensi yang dipengaruhi akibat perkembangan globalisasi yaitu dimensi ideologi, dimensi budaya, dimensi ekonomi dan dimensi politik. Keempat aspek tersebut akan di analisis dan di-*asssestment* dengan model *assessment qualitative* utamanya dalam konteks perubahan rezim yang terjadi di Malaysia paska Pemilu 2018. **Ketiga**, Reformasi Politik di Indonesia dan Malaysia tahun 1998 terjadi akibat dari pengaruh globalisasi politik di Asia dalam kurun waktu 1990-2000 dan hal ini menyimpan sebuah potensi untuk terjadinya hal yang sama di Malaysia pada periode berikutnya dengan dugaan sementara dalam penelitian ini merujuk pada runtuhnya rezim Barisan Nasional dibawah Pemerintahan Najib Razak. Penelitian ini akan melakukan kualitatif assetment terhadap beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab keruntuhan rezim politik Barisan Nasional yang sudah berkuasa selama 61 tahun di Malaysia.

Dalam konteks dimensi politik faktor terpenting adalah “penyebaran” demokratisasi (liberal) terutama sekali demokratisasi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga dan Negara sedang membangun. Subyek metodologi studi ini

terdiri atas 2 (dua) unsur utama yaitu (1). Studi Pustaka terhadap kajian mengenai globalisasi dan implikasinya terhadap demokratisasi di Asia Tenggara dan perubahan politik di Malaysia sebagai akibat pemilu 2018 (2). Studi Pustaka terhadap kajian-kajian demokratisasi di Asia Tenggara terutama kajian yang bersentuhan dengan Malaysia. Data utama dalam penelitian ini didapatkan dari studi literatur yang membahas mengenai aspek-aspek Globalisasi, Demokrasi dan Demokratisasi, Politik Indonesia dan Politik Malaysia secara umum. Sedangkan data pendukung adalah literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **BAB IV DINAMIKA POLITIK DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA**

### **4.1 Pembangunan ala Mahathir**

Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tenggara yang mengalami perubahan politik yang tidak biasa. Pemilu tahun 2018 memberikan sejarah tersendiri bagi Malaysia, rezim Barisan Nasional yang telah berkuasa lebih dari 62 tahun harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada barisan oposisi atau Pakatan Harapan. Sebuah transisi politik yang tidak biasa oleh sebab Malaysia merupakan negara dengan ciri system politik semi demokrasi yang mengharuskan sebuah kestabilan politik (Lijphart, 1969, Lijphart, 1977).

Posisi seperti ini membuat Mahathir di awal 2000-an menjadi ikon kepemimpinan Asia Tenggara. Sebagai contoh, tercatat pada tahun 2003 di kawasan Asia Tenggara Malaysia-lah satu-satunya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 4 % dibandingkan dengan negara tetangga-tetangganya seperti Singapura dan Indonesia. Sebuah prestasi yang luar biasa dicapai oleh Pemerintahan Mahathir dengan visinya Pencapaian Malaysia 2020. Di balik visi tersebut ada harapan yang sangat luar biasa (*great expectation*) dari beberapa pemimpin Malaysia kelak negara ini akan mencapai predikat negara industri maju pada tahun 2020.

Pada bagian lain, jika kita mengunjungi negara ini sering sekali kita melihat slogan *Malaysia Boleh*. Sebuah slogan yang memang diperlukan bagi negara yang



sedang membutuhkan nasionalisme untuk membangun tujuan bersama (*common platform*) pembangunan. Pada era Mahathir, pembangunan dengan basis nasionalisme menjadi corak pembangunan Malaysia, imajinasi mengenai nasionalisme inilah yang diperkenalkan oleh Anderson (2006) sebagai upaya menggalang solidaritas internal negara bangsa yang baru merdeka.

Slogan *Malaysia Boleh* sering sekali terdengar bagi membangkitkan nasionalisme negara ini, dan implikasi-nya produk mobil Proton misalkan dapat memperoleh pasar yang lumayan signifikan. Pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, ekonomi yang *boleh* mungkin adalah kalimat yang pantas diberikan kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang mendapat kategori *New Industrial Economic Countries*. Bersama dengan negara industri asia baru seperti Korea Selatan, posisi Malaysia di panggung ekonomi dunia mulai diperhitungkan, hal ini mirip dengan kemampuan Mahathir dalam mengkapitalisasi popularitas dirinya dalam panggung politik dunia.

Kapasitas intelektual dan kepemimpinan Mahathir disertai dengan kualitas kebijakan-kebijakan Pemerintahan Mahathir membuat Malaysia di era awal 2000-an ditampuk sebagai contoh negara ber-bangsa melayu yang mampu mengejar ketertinggalan paska kolonialisme dan masuk dalam kategori negara dengan pendapatan menengah. Pada saat yang sama Indonesia sedang mengalami proses *recovery* keluar dari guncangan ekonomi yang mengikis habis basis ekonomi Indonesia.

Kepemimpinan Politik Malaysia dibawah Mahathir memang menghasilkan beragam spekulasi soal model demokrasi yang mereka bangun. Semi demokrasi dengan sedikit otoritarian, pemilu yang penuh dengan scenario *Gerry Mandering*<sup>3</sup> dan tentu saja penggunaan birokrasi untuk mempengaruhi pemilih. Semua dugaan para pengamat luar negeri tersebut membuat Politik Malaysia dianggap tidak menjalankan demokrasi secara utuh. Mauzy (2013) misalkan menggambarkan Malaysia sebagai negara *coercive authoritarian in an authoritarian state* sebuah tipikal negara dengan menjalankan kepemimpinan politik secara coercive dalam negara yang otoriter.

*Coercive* disini diartikan adanya pemaksaan secara politik atau tekanan terhadap kelompok oposisi, hal ini tentunya berbeda dengan keadaan politik Indonesia pada era Suharto. Tradisi militer Malaysia yang tidak terlalu dominatif serta sistem monarki menjadikan negara ini relatif lebih luwes dalam mengelola system politik dibandingkan Indonesia pada era Suharto

Malaysia 2020 adalah sebuah visi yang dicanangkan oleh Mahathir dan ini banyak disebarluaskan oleh Mahathir lewat bukunya yang berjudul *a new deal for Asia*. Memandang ke timur adalah slogan Mahathir dalam memimpin kabinetnya dan visi ini terus dilaksanakan dengan konsisten oleh para pembantunya, dimulai dengan:

---

<sup>3</sup> Gerry mandering adalah strategi politik yang umumnya dipakai oleh pemerintah yang berkuasa untuk men-set up daerah pemilihan pemilu sesuai dengan kepentingan partai atau rezim yang berkuasa. Zonasi daerah pemilihan dalam pemilu bisa saja diubah sesuai dengan kepentingan rezim dan elit yang berkuasa.

*Pertama*, membangun sumber daya manusia membangun universitas-universitas yang berstandar Internasional, kemudahan-kemudahan bagi pelajar Bumiputera memperoleh pinjaman sangat lunak (tampa bunga) dari kerajaan untuk melanjutkan sekolah dan beasiswa bagi pelajar-pelajar berprestasi untuk dapat melanjutkan sekolah di luar negeri.

*Kedua*, menggalakkan pembangunan di berbagai bidang dengan simbol-simbol kemajuan sebuah negara, seperti menara Petronas menara tertinggi di dunia, Bandara Internasional *Kuala Lumpur International Airport* salah satu bandara termegah di kawasan asia, *Putra World Trade Center (PWTC)* sebagai salah satu pusat perdagangan dunia, pengembangan daerah yang terprogram dengan “cantiknya” seperti kawasan *Kuala Lumpur City Center (KLCC)*.

Isu-isu perbaikan sosial ekonomi yang dalam beberapa dasawarsa menjadi “*Isu Sejagat*” dalam era globalisasi bagi terjadinya perubahan diberbagai negara, menjadi hal yang sangat mustahil terjadi di negara ini (seperti isu-isu pendidikan murah bagi rakyat, beras murah dan segala kebutuhan yang bersifat primer) faktanya memanglah hal tersebut secara matematis sebagian besar telah terpenuhi dan duniapun mengakui bahwa pemerintahan Mahathir berhasil untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya.

Secara teoritik, *look east policy* atau cara pandang ke-timur adalah filosofis pembangunan ala Matahir. Furuoka (2007, pp. 6-7) menjelaskan:

*“Equally important was Mahathir’s desire to discard the former colonial master, Britain, and the “Buy British Last” campaign was a part of this drive.*

*At the same time, search for a new role model for Malaysia among East Asian countries began.<sup>7</sup> The introduction of the “Look East” policy became the cornerstone of Malaysia-Japan relations. Mahathir believed that Japan and South Korea, two East Asian countries that achieved an impressive economic success after World War II, could provide a good alternative development strategy and become role models for Malaysia”.*

Kebijakan Mahathir yang terkenal keras terhadap pengaruh barat terhadap negaranya terutama pengaruh bekas koloni Inggris membuat Mahathir mencoba mencari pendekatan alternatif pembangunan dan kekaguman Mahathir terhadap pembangunan pesat Jepang dan Korea Selatan menjadikan kedua negara itu contoh praktis pembangunan Malaysia ala Mahathir.

Memandang ketimur adalah sebuah slogan betapa Mahathir sangat kagum dengan perkembangan Jepang yang sangat cepat sehingga dapat mensejajarkan diri dengan beberapa negara maju di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Momentum bangsa Jepang yang mampu mengalahkan bangsa eropa ketika perang dunia pertama menjadi inspirasi dasar Mahathir dalam slogannya tersebut. Akan tetapi yang terpenting dari idenya tentang memandang ketimur itu tersebut adalah memajukan orang-orang melayu dalam percaturan ekonomi dalam negeri yang faktanya di kuasai kaum bukan bumiputera.

Kebijakan pembangunan dan ekonomi Malaysia yang anti barat dan kolonial, membuat negara ini mencoba menggaet investor dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Merujuk pada konsep *look east policy* tersebut, pada periode pertama kepemimpinan Mahathir, *Foreign Direct Investment* atau FDI Malaysia diarahkan fokus pada Jepang dan Korea Selatan. Dan ini yang kemudian berimplikasi pada erat-nya hubungan antar kedua belah negara.

Hal ini yang membuat hubungan Malaysia dengan Jepang begitu erat pada era Mahathir, “*Mahathir sought Japan’s assistance in realization of his industrialization programme and encouraged Japanese multinationals to invest in Malaysia and form joint ventures with Malaysian companies*” (Furuoka, 2007, p.1).

Akan tetapi pola hubungan dagang antara kedua negara, bantuan Jepang terhadap pembangunan Malaysia tidak berjalan dengan maksimal oleh sebab lemahnya implementasi konsep *look east policy*, dalam Bahasa akademik *lack of governance* atau lemah dari sisi *governance*.

Dalam beberapa kajian nampaknya Mahathir pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas visi kepemimpinannya, slogan memandang ketimur (*look east policy*) merupakan “kalimat sakti” Mahathir yang selalu dikemukannya dalam forum-forum skala nasional maupun internasional.

## **4.2 Politik Malaysia: Sebuah Diskusi**

Malaysia adalah sebuah negara yang sangat eksotik jika dipandang dari segi etnik. Melayu, Cina dan India adalah ras-ras yang paling dominan di negara ini dan yang paling ekstrim dari stratifikasi Malaysia ada peristilahan Bumiputera dan bukan Bumiputera dan hal ini diatur dalam undang-undang negara, bahwa yang dimaksudkan bumiputera adalah melayu dan orang-orang diluar melayu (Cina dan India) yang islam dan masuk menjadi islam dan yang bukan

merupakan Bumiputera adalah orang-orang Cina, Melayu dan bangsa-bangsa lainnya yang tidak masuk dalam kategori Melayu dan Islam.

Kenyataan pembagian berdasar kepada RAS tersebut tercermin dalam konteks realitas politik, partai-partai politik di Malaysia umumnya terbagi dalam kategorisasi RAS seperti UMNO (*United Malay National Organization*) adalah partai bagi sebagian besar orang Melayu, MCA (*Malaysian Chinese Association*) partainya orang-orang Cina Malaysia, MIC (*Malaysian Indian Community*) partainya orang-orang India Malaysia dan berbagai partai kecil lainnya yang kesemuanya tergabung dalam kekuatan politik Barisan Nasional, Barisan Nasional merupakan kekuatan politik yang berkuasa selama lebih dari 60 tahun, dan kekuasaan Barisan Nasional berakhir pada Pemilu 2018. Dalam konteks ini, Mauzy (2013, p.113) menyatakan bahwa:

*Since the early 1980 and the accession of DR. Mahathir Muhammad as prime minister, the state has become more repressive accommodation has been marginalized and ethnic relationship have deteriorated although there have been no serious ethnic clashes.*

Kenyataan ini kita lihat dengan dominasi UMNO yang mewakili representasi kaum Melayu dalam percaturan politik Malaysia, dalam beberapa dekade UMNO menjadi Partai yang mayoritas di Malaysia dan diformat untuk mewakili kepentingan politik Kaum Melayu. Pada bagian lain, barisan oposisi di Malaysia terdiri dari berbagai partai seperti PAS (*Partai Islam Se-MALAYSIA*), Partai Keadilan dan partai-partai kecil lainnya. Sebelum pemilu 2018 yang lalu kekuatan keduanya “bertempur” untuk merebut pemilih Malaysia utamanya kaum Melayu.

Dalam beberapa decade terakhir sebelum hasil Pemilu 2008, yang menjadi perhatian para pengamat adalah persaingan antara dua Partai Melayu (*Malays Based Party*) UMNO dan PAS dalam merebut hati pemilih Melayu. Berbagai manuver dilakukan kedua partai besar tersebut untuk merebut hati para konstituen dalam pemilihan umum nasional bahkan dalam salah satu kajiannya Zainah Anwar menggambarkan demi merangkul pemilih melayu seolah terjadi “perang saleh-salehan” dan berebut menjadi yang paling saleh antara elite UMNO dan PAS. Konteks ini juga mengaitkan bahwa Islam adalah faktor penting dalam kontestasi politik di Malaysia (Hamayotsu, 2002).

Pada bagian lain setidaknya ada dua periode Politik Malaysia. Pertama, *political foundation* yang terjadi kurun waktu antara 1957-1978 dan periode *political and economic development* dibawah kepemimpinan Mahathir antara tahun 1981-2003. Sebagai negara yang merdeka setelah perang dunia kedua, karakter dan nations building yang dibangun oleh Elit Malaysia menampilkan corak politik yang akomodatif.

Beragam etnis sebagai akibat dari kolonisasi, ini juga berdampak pada konfigurasi elit politik, ciri khusus Malaysia yang tentunya menampilkan pola politik yang berbasis pada etnis atau *ethno-based politics* apalagi hal ini didukung dengan beragam partai politik yang mengakomodasi beragam etnis (Warganegara, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Nadzri (2019, p.163) memberikan gambaran mengenai pembangunan politik Malaysia semenjak kemerdekaan negara sebuah

model pembangunan politik “*one-party dominant rule in 1957 evolving to a two-plus-one party system by mid-2018*”. Eskalasi politik yang sangat dinamis, disamping merupakan peninggalan koloni Inggris, hubungan antar ketiga etnis besar keturunan Melayu, Tionghoa dan India juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan politik Malaysia.

Seperti halnya negara membangun, isu-isu politik keagamaan juga sangat laku berkembang di Malaysia, seperti ‘jualan politik’ penerapan syariat islam, perilaku-prilaku pejabat pemerintah yang tidak islami serta hal lainnya yang bersifat keagamaan dan ini dikapitalisasi oleh partai-partai berbasis Islam di Malaysia walaupun dalam, beberapa dekade terakhir nasionalisme melayu atau *Malay Nationalism* menjadi isu dominan dalam beragam event politik.

Disatu sisi PAS mengatakan bahwa UMNO adalah partai yang sekuler dan tidak islami karena didasarkan kepada beberapa pemikiran Mahathir yang dianggap sekuler, kampanye ini secara tidak langsung berhasil terutama pada kalangan melayu islam dan hal ini diindikasikan dengan hasil Pemilihan Umum tahun 1999 negara bagian kelantan dan trengganu yang berhasil dikuasai oleh PAS. Akan tetapi UMNO membalas kampanye PAS tersebut, dan memberi pernyataan yang beredar luas di media bahwa PAS adalah partainya oposisi dan tidak memiliki nasionalisme karena telah memecah belah bangsa melayu.

Sebelum Pemilu 2018, strategi oposisi kapitalisasi isu Islamisme dalam lanskap politik Malaysia secara intensif dilakukan terutama sekali kampanye politik yang



dilakukan barisan oposisi terhadap pemerintahan Mahathir medio 1981 sampai dengan 2003. Akan tetapi posisi inkumben membuat daya tawar Mahathir tidak terhalang oleh isu sektarian yang dilancarkan oleh barisan oposisi pada saat yang sama perkembangan ekonomi Malaysia dibawah Mahathir juga membuat yakin publik terhadap eksistensi Barisan Nasional.

Sebelumnya, proses transisi politik yang dinamis terjadi ketika Mahathir secara mengejutkan mundur dari politik tahun 2003<sup>4</sup>, pada saat itu Abdullah Ahmad Badawi mengambil alih kepemimpinan politik selama dari tahun 2003 sampai dengan 2009. Pada periode selanjutnya Najib Razak berkuasa sejak tahun 2009 sampai dengan 2018. Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri tahun 2018 diusia yang cukup tua sebagai pemimpin politik setelah koalisi *Pakatan Harapan* memenangkan pemilu dengan suara mayoritas pada tahun 2018.

Mendiskusikan Politik Malaysia tidak bisa dilepaskan dari dua faktor utama. *Pertama*, cara dan system politik di negara ini merupakan peninggalan kolonial Inggris, pembagian politik yang mengakomodasi kepentingan beragam etnis menjadi salah satu cara bagaimana Malaysia berpolitik (Warganegara, 2018), dalam konteks yang lain memang ada kecenderungan bahwa sentiment etnis mulai melemah, Mohamad (2008, p.455) menjelaskan:

---

<sup>4</sup> Perhimpunan Agung UMNO yang ke 54 medio 2003. Perhimpunan Agung katakanlah sebuah Mukhtar atau Musyawarah Nasional (jika di Indonesia) bagi partai tersebut. Momentum perhimpunan agung yang ke 54 adalah sebuah momentum penting bagi regenerasi kepemimpinan politik di Malaysia kepemimpinan. Mahathir yang mengalami kesuksesan dalam bidang ekonomi adalah fakta yang tak dapat dipungkiri namun dilain sisi ketidakterbukaan dalam sisi politik tetaplaj menjadi isu sentral yang terus dipergunakan lawan-lawan politiknya sebagai sebuah kampanye anti pemerintah, di lapangan terlihat bahwa kemajuan yang diperoleh dalam bidang ekonomi tidak disertai dengan isu-isu demokratisasi sistem politik di Malaysia.

*“Its play of the ‘Malay-hegemony’ card is already losing currency among Malay-Muslim voters. However, does this spell the end of race-based politics? Here we have to distinguish ethnic concerns from ethnic representation. Racial rights and religious rights will continue to be aired by political lobbies and civil society although the representation of such concerns may not necessarily be taken up by the ethnic champions”.*

Pada bagian lain, tidak mudah meninggalkan politik berbasis agama dan etnis di Malaysia walaupun sekat ruang dan waktu memberikan sebuah kesempatan besar bagi politisi mengkapitalisasi kedua isu ini bagi kepentingan politik pribadi dan partainya. Pembagian politik berdasar etnis juga merupakan sebuah akomodasi yang dilakukan pihak kolonial Inggris dalam rangka memberikan peluang masuknya etnis Tionghoa dan India yang dibawa koloni Inggris sebagai bagian dari kompensasi dagang *British East Indies* di Malaysia.

Model konsosiasional demokrasi dirasa model yang paling relevan bagi mengakomodasi beragam kepentingan elit politik Malaysia yang sudah terbiasa dengan framing politik *ethno-based political interest* atau kepentingan politik berbasis etnis. Dalam konteks ini, Warganegara (2018, p.37) juga menjelaskan:

*“To some extent, the interplay of ethnic politics and political patronage in South East Asia shares similarities with ethnic politics and patronage democracy in South Asian countries such as India. In India, another former British colony, a plural society with various ethnic groups and languages was maintained by British colonial administrations through a policy of ethnic segregation not at all dissimilar to that implemented in Malaysia and Singapore”.*

**Kedua**, keberlanjutan Politik Malaysia sangat tergantung pada keberadaan tokoh kharismatik dipanggung politiknya. Dalam beberapa decade terakhir misalkan, panggung demokrasi Malaysia selalu diwarnai dengan kontes politik antara dua figure penting, Mahathir Mohmmad dan Anwar Ibrahim. Politik Malaysia hari ini

justru melahirkan tokoh alternatif diluar kedua tokoh tersebut sebagai dampak berkoalisi-nya kedua tokoh yang lama berseteru dalam koalisi *Pakatan Harapan*.

Landskap politik Malaysia hari ini melahirkan sebuah kemungkinan terjadinya proses regenerasi politik dengan cepat. Saat ini misakan sudah banyak tokoh muda dalam ruang politik Malaysia, sebagai contoh keberadaan Syed Saddiq sebagai Menteri Olah Raga ataupun Nurul Izzah Anawar, putri tokoh politik Malaysia, Anwar Ibrahim. Dalam konteks Malaysia sudah memulai melakukan peremajaan politisi dengan memberikan peluang pada generasi muda mengisi pos-pos penting politik negara tersebut, dampaknya mungkin tidak akan instan, akan tetapi secara umum, masa depan Politik Malaysia terlihat tidak akan kekurangan banyak kader muda untuk 5 atau 10 tahun kedepan.

## **BAB V GLOBALISASI, MEDIA DAN PERUBAHAN POLITIK MALAYSIA**

### **5.1 Globalisasi, Politik dan Media Alternatif: Pengalaman Malaysia**

Globalisasi menjadi tema penting dalam perjalanan dunia dalam beberapa decade terakhir, perkembangan sains dan teknologi secara fundamental juga berpengaruh terhadap perubahan sosial masyarakat. Sebagai contoh, demokratisasi yang terjadi di beberapa negara Asia dan kasus *Arab Spring* menjadi contoh bagaimana dampak globalisasi ‘memaksa’ beberapa negara otoriter untuk berdemokrasi.

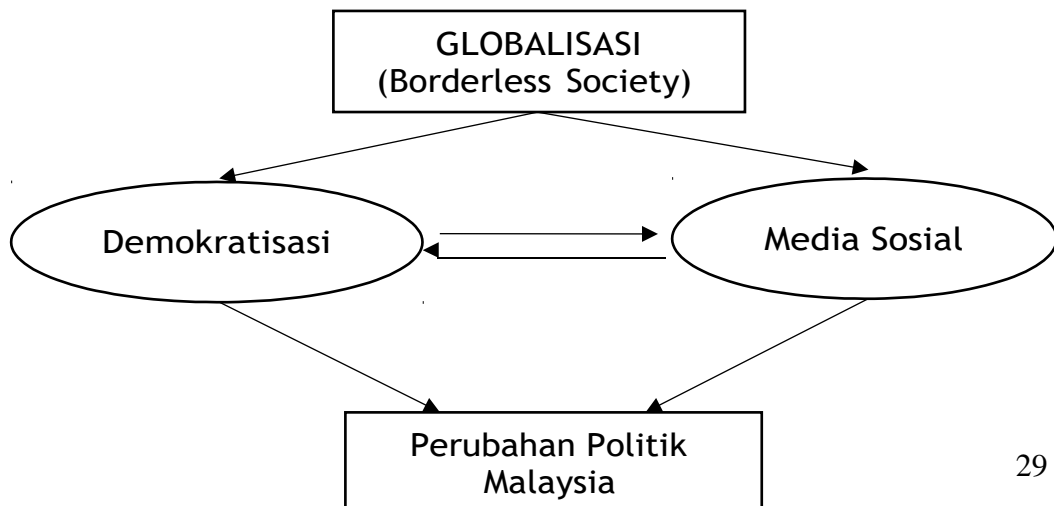
Dalam kajian teoritik, respon terhadap globalisasi juga memberikan dampak yang berbeda antar satu negara dengan negara lain. Sebagai negara yang lemah secara ekonomi ada kecenderungan respon tersebut akan cenderung mengikuti arus besar atau dalam kajian David Held dikenal sebagai kelompok "*Hyperglobalizer [...]* *considers globalization to be a fundamentally new epoch in human history, in which old categories and concepts no longer apply*" (Lynch, 2000, p.93).

Kelompok *hyperglobalizer* ini menjadi pengikut kuat Globalisasi disebabkan negara-negara tersebut tidak mampu untuk menolak dampak dan pengaruh globalisasi tersebut dalam konteks *internal policy* mereka. Dalam konteks, globalisasi secara diametral mendorong sebuah partisipasi yang aktif dalam format demokrasi deliberatif (konsep demokrasi dialogis). Lynch (2000, p.99) lebih lanjut menjelaskan:

*"When thinking about democracy in a global context, is official participation in the deliberations, bargaining, and cutting deals on the inside less relevant than the noisy social movements on the outside? This question insistently points international theory to fundamentally contested debates in democratic theory about elite democracy and popular participation".*

Globalisasi juga berdampak pada persebaran media sosial yang massif dan ini menjadi tigger faktor yang mempercepat proses demokratisasi diberbagai belahan dunia. Kemampuan media sosial untuk memberikan berita yang cepat menjadikan media non konvesional ini berperan besar dalam proses demokratisasi diberagam negara termasuk juga dalam konteks Malaysia.

Respon dunia terhadap demokrasi yang lebih dialogis sebagai akibat dari pengaruh globalisasi ini yang secara diamentral kemudian mempengaruhi pola persebaran demokrasi dunia. Sebagai contoh, fenomena *Arabs Spring* dimulai dari protes besar masa bagi menuntut kebebasan atas hak sipil. Dalam konteks ini ada *demand* yang muncul dari akar rumput untuk mendorong sebuah negara yang otoritarian menjadi lebih demokratis. Demokratisasi yang terjadi di *Arabs Spring* secara tidak langsung adalah proses lanjutan dari gelombang demokratisasi yang dipopulerkan oleh Huntington (1993) di era 1990-an.



## **Gambar 2** **Hubungan Globalisasi, Demokratisasi dan Media Sosial**

Gambar 2 diatas menjelaskan bagaimana globalisasi mempengaruhi terjadinya demokratisasi vis a vis media sosial yang kemudian berdampak pada perubahan Politik Malaysia paska Pemilu 2018. Dalam konteks ini, portal Malaysiakini.com dan Malaysian Insider berperan sebagai agen perubahan politik yang terjadi di Malaysia dengan berhasil berubah *political taste* dari pemilih, berita-berita mengenai sskandal korupsi 1MDB Najib Razak, gaya hidup elit politik, kenaikan biaya hidup dan problematika ekonomi negara tersampaikan pada publik yang selama ini akses informasi didominasi oleh media-media mainstream pro pemerintahan Najib Razak.

Banyak faktor yang menjadi penyebab kekalahan Barisan Nasional dalam Pemilu 2018 yang lalu, selain soal skandal 1MDB Najib Razak, kenaikan harga kebutuhan hidup, ketidakstabilan ekonomi atau dengan kata lain kegagalan pemerintahan Najib Razak mem-*maintain* ekonomi negara, semua *trigger* faktor tersebut termediasi dengan baik lewat medium media alternatif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa media alternatif mempunyai peran yang cukup signifikan dalam proses perubahan politik Malaysia. Terdapat beberapa media non-mainstream yang memengaruhi peta jalan dan Politik Malaysia paska Pemilu 2018, beberapa media alternatif yang dominan dalam mewarnai Politik Malaysia adalah *Malaysiakini.com* dan *Malaysia Insider*.

## **5.2 Kanal Malaysia Kini, The Malaysian Insider dan Gerakan Pro-Demokrasi**

Kehadiran media-media alternatif seperti *Malaysiakini.com* ataupun kanal mereka di *Youtube* juga berperan dalam memberikan berita yang berimbang terhadap posisi politik Pemerintahan Barisan Nasional yang selama ini ditopang oleh media-media besar konvensional seperti surat kabar *Utusan Malaysia* dan *Berita Harian*. Thus, Kehadiran media alternatif memberikan dampak pada semakin besarnya pilihan-pilihan politik warga Malaysia dalam Pemilu 2018. Beragam pilihan masyarakat dalam Pemilu 2018 yang lalu mencerminkan media-media alternatif memberikan insight terhadap pemilih Malaysia.

Secara teoritik, popularitas Barisan Nasional sebenarnya sudah tercabar pada pemilu 2013 akan tetapi terlihat Pemerintahan Barisan Nasional dibawah Perdana Menteri Najib Razak tidak merespon potensi kekalahan tersebut dengan baik dan akibatnya terlihat pada hasil pemilu 2019, Barisan Nasional menderita kekalahan yang massif dilevel pemilu nasional dan lokal.

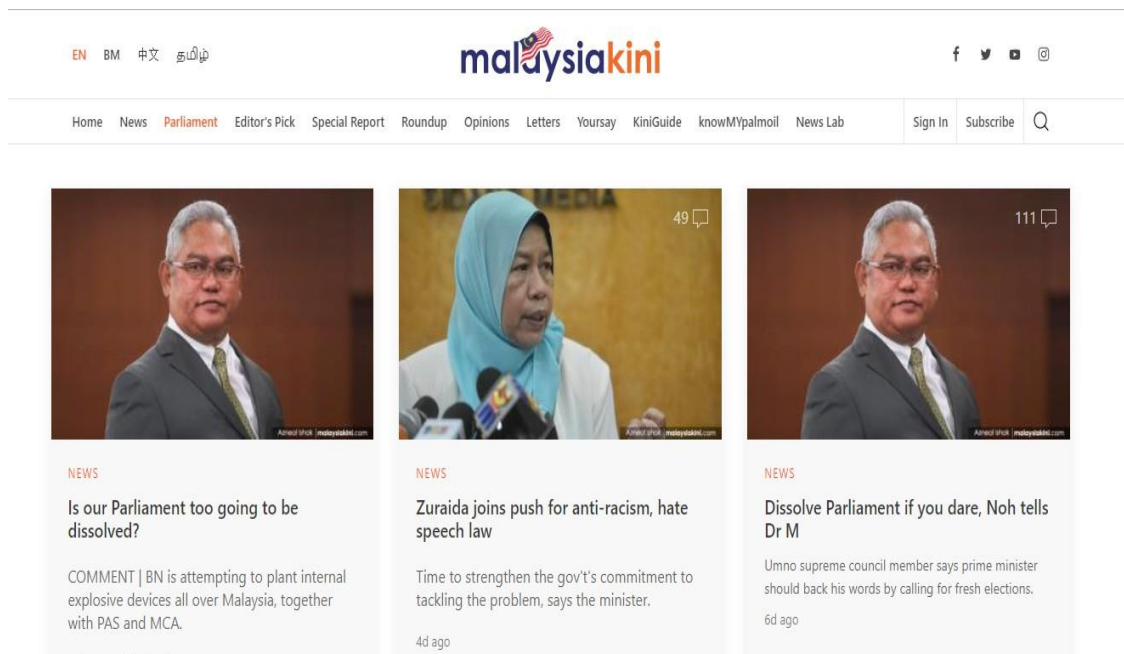
Salah satu faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan politik dengan cepat di Malaysia adalah peran media-media non konvensional alternatif yang secara langsung memengaruhi ruang publik. Portal *Malaysiakini.com* misalkan menyajikan berita-berita alternatif yang mengisi ruang publik dan ini secara efektif memberikan pilihan-pilihan berita alternatif bagi warga negara-nya.

Mengenai peran portal *Malaysiakini.com*, Ishak (2009, p.430) menjelaskan:

*“Malaysiakini.com presents daily news and views in four languages namely English, Malay, Chinese and Tamil. Readers from different races and religions have actively participated in the debate and discussion in the portals. Sensitive subjects and viewpoints deemed taboo by the*

*mainstream media such as racial quota systems, the monarchy, apostasy, shariah law, language, education and migrant workers have generated a new understanding on these issues”.*

Dengan *coverage* pembaca yang melintas etnis, portal Malaysiakini.com secara cepat masuk ke ruang publik dan secara tidak langsung memberikan pendidikan politik kepada publik Malaysia. Berita-berita yang disampaikan oleh portal ini juga menampilkan berita yang hampir tidak mungkin menjadi isu sentral dalam penerbitan media-media mainstream Malaysia. Sebagai contoh, perbincangan mengenai isu sensitif seperti menggugat system monarki, syariat Islam dan system kuota yang berasas pada distribusi etnis, hal ini dibincangkan dan didiskusikan secara luas oleh Malaysiakini.com (Ishak, 2009).



**Gambar 2.**  
**Portal Malaysiakini.com<sup>5</sup>**

<sup>5</sup> Diakses pada laman <https://www.malaysiakini.com/en/tag/parliament> pada tanggal 6 September 2019 pukul 15:00



Secara tidak langsung ruang minda publik ‘terhiasi’ oleh argument yang beredar di ruang publik dan hal ini memerikan dampak pada perubahan peta pemilih pada Pemilu Malaysia 2018. Malaysiakini.com juga menjadi laman berita dengan banyak pembaca pada bulan juli 2018 dan ini mengalahkan laman-laman media konvensional Malaysia seperti The Star padahal sebelumnya medio Mei 2009 laman media ini hanya menduduki peringkat ke-4 dan kalah popular dibandingkan dengan Utusan Malaysia dan Berita Harian (Ishak, 2009).

Selain portal Malaysiakini.com media alternatif lain yang menjadi rujukan pemilih Malaysia adalah portal *The Malaysia Insider*, pada tahun 2016 media ini pernah di-blocking oleh otoritas setempat oleh sebab menyajikan berita skandal korupsi 1MDB Perdana Menteri Najib Razak yang merugikan negara. Seperti halnya Malaysiakini.com, portal *The Malaysian Insider* juga menyajikan berita-berita alternatif yang tidak disuarakan oleh media pro pemerintah.

*Blocking* yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia kala itu dianggap sia-sia oleh sebab di era kekinian ketika teknologi semakin maju akan sangat sulit sensor negara untuk membatasi ruang gerak pengguna internet dan itu terjadi dalam konteks Malaysia, justru dengan *blocking* yang dibuat oleh Pemerintahan Najib Razak, hal ini membuat warga Malaysia *aware* terhadap situasi yang sedang terjadi di negara mereka. Gambar 3 dibawah adalah berita soal blocking yang dilakukan oleh Pemerintahan Najib Razak terhadap portal berita *The Malaysian Insider* medio 2016 yang lalu.

Dalam konteks lain justru *blocking* yang dilakukan menimbulkan sebuah penolakan dari masyarakat luas, sebagian warga Malaysia justru mencari kebenaran berita itu yang secara tidak langsung berdampak pada *public awareness* atau kesadaran public atas peristiwa politik yang sedang berlangsung di Malaysia. Dan ini secara kalkulasi politik justru membuat Pemerintahan Barisan Nasional semakin kehilangan popularitas-nya di masyarakat.



Aliran condemns the blockade by internet regulator Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) on news portal The Malaysian Insider (TMI) for purportedly breaching Section 233 of the Communications and Multimedia Act 1998.

### Gambar 3

**Portal The Malaysian Insider yang di-block oleh Pemerintahan Najib Razak oleh sebab secara berkesinambungan memberitakan skandal 1MDB<sup>6</sup>**

*The Malaysian Insider* didirikan oleh Png Hong Kwan dan Sreedhar Subramanian (Ishak, 2009), sebagai media alternatif pola berita yang disampaikan oleh *The Malaysian Insider* serupa dengan *Malaysiakini.com*, menyajikan berita yang

<sup>6</sup> Diakses pada laman <https://aliran.com/media-statements/2016-media-statements/blocking-the-malaysian-insider-is-an-affront-to-media-freedom/> pada tanggal 9 September 2019 pukul 10.41

dilarang di-coverage oleh media besar Malaysia. Pada bagian lain apa yang dilakukan kedua media ini sebenarnya adalah simbol perlawanan terhadap media-media konvensional yang pro kubu pemerintahan Najib Razak. Dan ini merupakan secara teoritik merupakan hal yang tidak dapat dinafikan sebagai dampak dari perkembangan globalisasi dan demokratisasi yang terjadi di beberapa negara Asia.

Sifat informasi yang *borderless* dan tidak lagi terpisah jarak dan waktu serta akses internet yang mudah menyebabkan proses demokratisasi yang terjadi berjalan dengan cepat. Dalam konteks ini kemudian menjadi sangat wajar jika *Malaysiakini.com* dan *The Malaysian Insider* menjadi media yang berperan besar mengubah peta Politik Malaysia berangkat dari argumentasi kemampuan media ini untuk memengaruhi ruang publik. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Salman and Hasim (2011, p.20), mereka menyatakan bahwa:

*“The government can no longer under estimate the power and influence of the new media, especially the use of blogs as experienced in the run-up to the March 2008 General Elections. It has indeed become a force to be reckoned with. This is an indication of the power of the Internet as an alternative media platform. We are experiencing what one may call the new and emerging democratic and political landscape made possible by the new media. The new media provide an alternative channel where the masses can air their grievances and concern without having to go through cumbersome procedures or without interference or ‘gate-keeping’ from editors resulting in the message not reaching the audience”.*

Indikasi pengaruh media alternatif terhadap politik Malaysia sudah mulai terlihat medio 2008, merujuk penelitian yang dilakukan oleh Salman and Hasim (2011) misalkan, hasil penelitian tahun 2011 berdasarkan pada kontestasi Pemilu 2008, mereka menyatakan bahwa hasil pemilu 2008 membuktikan bahwa pemerintah

tiak bisa menganggap sebelah mata soal pengaruh media alternatif terhadap politik dalam negeri Malaysia secara khusus penelitian ini menyoroti peran personal *blogs* dalam konteks yang sama penelitian Salman dan Hashim juga menjelaskan bahwa keberadaan internet dan media alternatif akan menumbuhkan demokrasi dan dapat merubah peta lanskap peta politik Malaysia.

Pemilu 2008 bisa dikatakan sebagai awal dari *political turmoil*-nya Malaysia, (Nadzri, 2019) menjelaskan bahwa pada Pemilu 2008, Barisan Nasional kehilangan beberapa kursi terutama di wilayah perkotaan dan pada saat yang sama Barisan Nasional juga kehilangan kontrol terhadap beberapa wilayah di pantai barat semenanjung Malaysia dan tidak mampu untuk mengambil alih kontrol kuasa politik terhadap wilayah Penang dan Selangor, dua wilayah besar di Semenanjung Malaysia. Dan hal ini berlanjut sampai pada Pemilu selanjutnya. Pada Pemilu ke-13 tahun 2013 misalkan, Barisan Nasional kehilangan banyak kursi dan mulai terindikasi mengalami arus kuat politik dengan perolehan kursi mencapai 89 kursi di parlemen nasional (Weiss, 2013).

*Blocking* yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia terhadap media-media alternative juga tidak efektif untuk menekan ‘semburan’ informasi mengenai *political attitude* dari elite Malaysia itu sendiri. Disamping peran media alternatif, faktor lain yang tidak bisa dinafikan dan mampu mengubah peta politik Malaysia adalah pemilih yang mempertimbangkan aspek ekonomi negara. Secara teoritik, skandal pribadi dan kinerja ekonomi juga menjadi alasan lain terjadi-nya *swing*

*voter* atau peralihan pilihan warga Malaysia dan meninggalkan Pemerintahan Barisan Nasional. Penelitian oleh Lee (2019, p.16) misalkan menjelaskan bahwa:

*“The 14th general election (GE-14) in Malaysia was a watershed event. The election witnessed the defeat of the Barisan Nasional coalition which had ruled the country since its independence in 1957. A number of factors are likely to have driven the outcomes in the GE-14. Overall, the robust economic growth was not a positive factor in voter support for BN in the election. Unemployment and inequality (measured by Gini coefficient) are likely to have negative effects on voter support for BN. Contrary to the findings of media reports and surveys, inflation was not a significant determinant. It is possible that official consumer prices indices (CPI) did not capture cost of living issues adequately”.*

Penelitian Lee (2019) memberikan gambaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik tidak berdampak pada sentiment positif pemilih dalam Pemilu 2018, akan tetapi ternyata angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi yang diukur dengan koefisien gini, kedua faktor inilah dalam konteks kinerja ekonomi yang berkontribusi terhadap *swing voter* pemilih Malaysia. Berdasarkan penelitian, Lee (2019) juga dijelaskan bahwa faktor inflasi juga tidak berdampak pada perubahan pola pilihan warga Malaysia namun Lee menjelaskan bahwa kemungkinan hal itu terjadi karena *consumer prices indices (CPI)* tidak berhasil men-*capture* soal kenaikan biaya hidup warga.

## BAB VI KESIMPULAN

Membincangkan Politik Malaysia tidak akan bisa dilepaskan dari ide besar soal politik etnis, akan tetapi pada bagian lain perubahan politik yang terjadi selepas Pemilu 2018 mengindikasikan ada perubahan yang cukup signifikan soal sentiment etnis. Pemilu Malaysia tidak lagi selamanya bergantung pada sentimen etnis dan agama, kinerja pemerintah menjadi hal yang mulai dipertimbangkan oleh pemilih, seperti halnya kajian-kajian teoritis mengenai inkumben oleh (Trounstine, 2011, Trounstine, 2013).

Hasil pemilu terbaru Malaysia menunjukkan faktor etnis tetap menjadi hal utama yang dipertimbangkan tidak ada split etnis dan partai politik menjelaskan hal tersebut, sebagai contoh, pendukung UMNO mengubah pilihan politiknya pada Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), partai baru besutan Mahathir. Pada bagian lain, persoalan korupsi 1MDB rezim Najib Razak dan performa ekonomi negara yang lemah menjadikan faktor utama perubahan politik di Malaysia.

Globalisasi dan proses demokratisasi politik yang terjadi diberbagai belahan dunia juga menjadikan Malaysia juga negara yang terdampak. Borderless society atau masyarakat tanpa sekat ruang dan waktu menjadikan selubung informasi skandal elit yang selama ini berhasil dikontrol oleh media pemerintah dapat terkuat ke masyarakat dan menjadi pertimbangan publik. Rezim *Barisan Nasional* yang berkuasa di Malaysia selama 61 tahun harus menyerahkan tampuk pimpinan politik nasional pada koalisi partai oposisi (*Pakatan Harapan*).

Secara teoritik ada hal yang menarik dalam kajian ini walau tidak mengubah kajian teoritik sebelumnya, *incumbency* memang menjadi faktor utama keterpilihan, pejabat petahana yang tidak bekerja dengan baik tentu akan mendapat hukuman tidak terpilih pada pemilu selanjutnya. Hasil riset ini menemukan bahwa skandal korupsi yang dituduhkan pada razim Barisan Nasional dibawah kendali Najib Razak secara efektif mereduksi popularitas pemerintah pada Pemilu 2018, hal ini sesuai kajian Hirano and Snyder Jr (2012) yang menyatakan skandal pribadi menjadi faktor utama kekalahan petahana dalam pemilu.

## RINCIAN KEBUTUHAN DANA

Penelitian ini membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000,- yang terinci sebagai berikut:

No	Keterangan	Sat	Vol	Frek	Jml	Nominal	Total
<b>1</b>	<b>Travel Expenditure</b>						
	Transport Peneliti	orang	3	1	3	2,000,00 0	6,000,0 00
	Konsumsi Peneliti	orang	3	1	3	200,00 0	600,0 00
	<b>Sub Total</b>						<b>6,600,00 0</b>
<b>2</b>	<b>Bahan Habis Pakai</b>						
	Pembelian ATK	Paket	1	3	3	550,00 0	1,650,0 00
	<b>Sub Total</b>						<b>1,650,00 0</b>
<b>3</b>	<b>Laporan dan Publikasi</b>						
	Penggandaan Proposal	eks	6	1	6	75,00 0	450,0 00
	Publikasi ke prosiding ber ISBN	Paket	1	1	1	700,00 0	700,0 00
	Penggandaan Laporan	eks	6	1	6	100,00 0	600,0 00
	<b>Sub Total</b>						<b>1,750,00 0</b>
	<b>TOTAL</b>						<b>10,000,00</b>

							0
--	--	--	--	--	--	--	---



## DAFTAR PUSTAKA

- ANDERSON, B. 2006. *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism*, Verso books.
- BAYLIS, JOHN & STEVE SMITH. 1997. *The Globalization of World Politics*. Oxford University Press. United Kingdom.
- DOORENSPLEET, R. 2000. Reassessing the three waves of democratization. *World Politics*, 52, 384-406.
- EMBONG, A. R. 2000. *Negara bangsa: proses dan perbahasan*, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
- FURUOKA, F. 2007. Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case Studies of the ““Look East”” Policy and Japanese Investment in Malaysia. *Asian Survey*, 47, 505-519.
- GORBACHEV, MIKAIL. 1987. *Mikail Gorbachev Perestroika (Pemikiran Baru Untuk Negara Kami dan Dunia)*, PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- HAMAYOTSU, K. 2002. Islam and nation building in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in comparative perspective. *Pacific Affairs*, 75.
- HIRANO, S. & SNYDER JR, J. M. 2012. Primary elections and political accountability: What happens to incumbents in scandals? *Quarterly Journal of Political Science* forthcoming.
- HUNTINGTON, S. P. 1993. *The third wave: Democratization in the late twentieth century*, University of Oklahoma press.
- ISHAK, A. 2009. The alternative new media and democratic participation in Malaysia: opportunities and challenges.
- KUNIO, YOSHIHARA. 2001. *Globalization and National Identity*. UKM Press. Malaysia
- LEE, C. 2019. Economic Voting and the End of Dominant Party Rule in Malaysia.
- LIJPHART, A. 1969. Consociational Democracy. *World Politics*, 21, 207-225.
- LIJPHART, A. 1977. *Democracy in plural societies: A comparative exploration*, Yale University Press.
- LYNCH, M. 2000. Globalization and international democracy. *International Studies Review*, 2, 91-101.
- MAUZY, D. 2013. Malaysia: Malay political hegemony and 'coercive consociationalism'. *The Politics of Ethnic Conflict Regulation*. Routledge.
- MOHAMAD, M. 2008. Malaysia—democracy and the end of ethnic politics? *Australian Journal of International Affairs*, 62, 441-459.
- NADZRI, M. M. 2019. The 14th General Election, the Fall of Barisan Nasional, and Political Development in Malaysia, 1957–2018. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 37, 139-171.

- SALMAN, A. & HASIM, M. S. 2011. New media and democracy: the changing political landscape in Malaysia. *Akademika*, 81.
- TROUNSTINE, J. 2011. Evidence of a local incumbency advantage. *Legislative Studies Quarterly*, 36, 255-280.
- TROUNSTINE, J. 2013. Turnout and incumbency in local elections. *Urban Affairs Review*, 49, 167-189.
- WARGANEGARA, A. 2005. *Globalisasi dan Peminggiran Politik Islam*. Lampung Post. 16 September. Hlm 7
- WARGANEGARA, A. 2018. *Ethnicity and its Role in Local Elections in the Context of Transmigration: Case Studies from Lampung, Indonesia*. Doctor of Philosophy University of Leeds.
- WEISS, M. L. 2012. *Politics in cyberspace: New media in Malaysia*, Friedrich-Ebert-Stiftung, fesmedia Asia.
- WEISS, M. L. 2013. Malaysia's 13th general elections: Same result, different outcome. *Asian survey*, 53, 1135-1158.

## **CURICULLUM VITAE PENELITI**

### **KETUA PENELITI**

Nama : Arizka Warganegara,.Ph.D  
NIP 19810620 2006041003  
Pangkat/Gol : Lektor/IIIId  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **PENELITI PENDAMPING**

Nama : Dr. Syarief Makhya  
NIP 195908031986031003  
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IVc  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### **PENELITI PENDAMPING**

Nama : Drs. Denden K Drajat,.M.Si  
NIP 19600729 1990101001  
Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IVa  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik